

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Program Keluarga Berencana (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai)

Program Keluarga Berencana merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka dibutuhkan pelaksanaan yang baik oleh implementor atau pelaksana dalam menjalankan fungsinya.

Pertumbuhan angka penduduk yang tinggi setiap tahunnya di Kota Dumai membawa penulis ingin melakukan penelitian mengenai implementasi program Keluarga Berencana di Kota Dumai yang mana merupakan sebuah kebijakan yang bersangkutan dalam jumlah kependudukan di Kota Dumai.

1. Identitas Responden

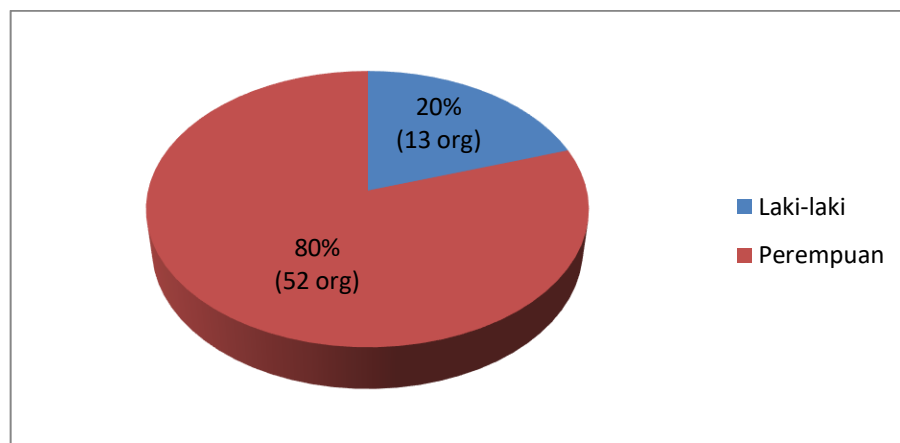
Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang merupakan unsur pelaksana di bidang kependudukan. Sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan identitas responden dengan judul Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Dumai) dengan jumlah responden sebanyak 65 orang yang terdiri dari Pegawai sebanyak 58 orang dan Kader (mitra kerja) sebanyak 7 orang. Untuk melihat data responden dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap Implementasi Program Keluarga Berencana, penulis mengambil seluruh Pegawai sebagai objek penelitian termasuk Kader (mitra kerja) di setiap Kecamatan Kota Dumai. Penulis dapat menggambarkan perbedaan jenis kelamin yang menjadi responden penelitian. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan jenis kelamin responden dapat dilihat dari diagram berikut ini:

Diagram V.1
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

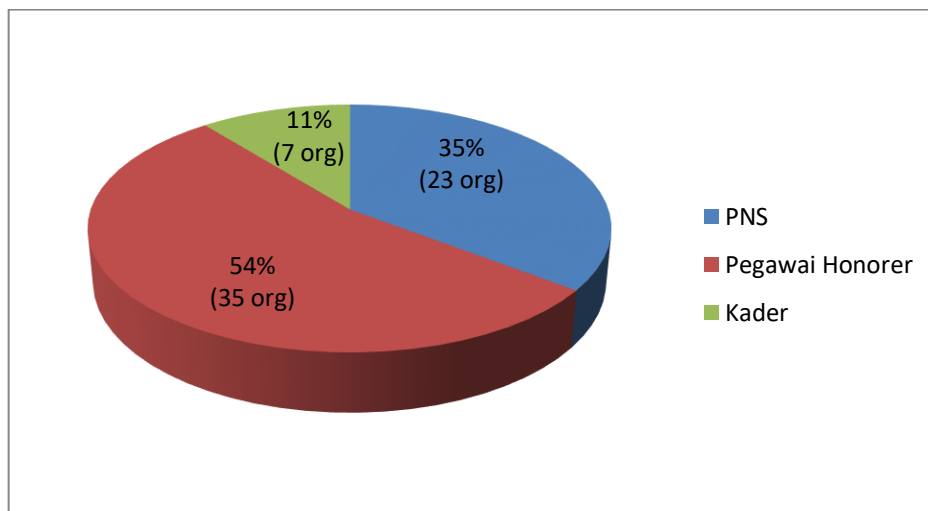
Berdasarkan diagram V.1 diatas dapat diketahui dari 65 orang responden penelitian, terdapat yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13

orang dengan persentase 20% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 52 orang dengan persentase 80%.

b. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan adalah profesi seseorang sebagai aktivitas utamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam penelitian ini, pekerjaan responden dapat menggambarkan apakah responden tersebut mempunyai kapasitas atau tidak dalam menjawab berbagai pertanyaan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan pekerjaan responden dapat dilihat dari diagram berikut ini:

Diagram V.2
Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan



Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

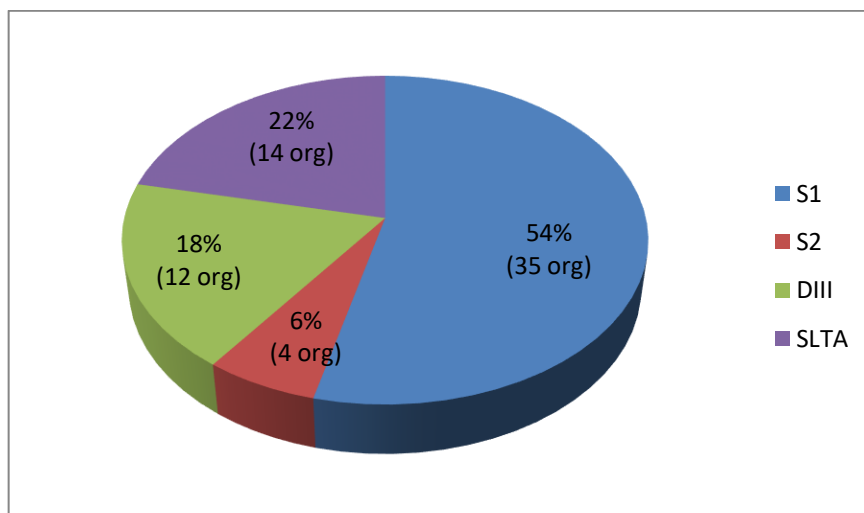
Berdasarkan diagram V.2 diatas dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan respoden yang dominan dalam penelitian ini adalah Pegawai Honorer sebanyak 35 orang dengan persentase 54%, PNS sebanyak 23

orang dengan persentase 35% dan Kader sebanyak 7 orang dengan persentase 11%.

c. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Perbedaan tingkat pendidikan merupakan salah satu gambaran untuk bisa menilai kecakapan dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan terkait dengan implementasi program keluarga berencana. Dengan adanya perbedaan tingkat pendidikan dapat memberikan gambaran dalam mencari jawaban dari penelitian penulis untuk lebih jelasnya perbedaan tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram V.3
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

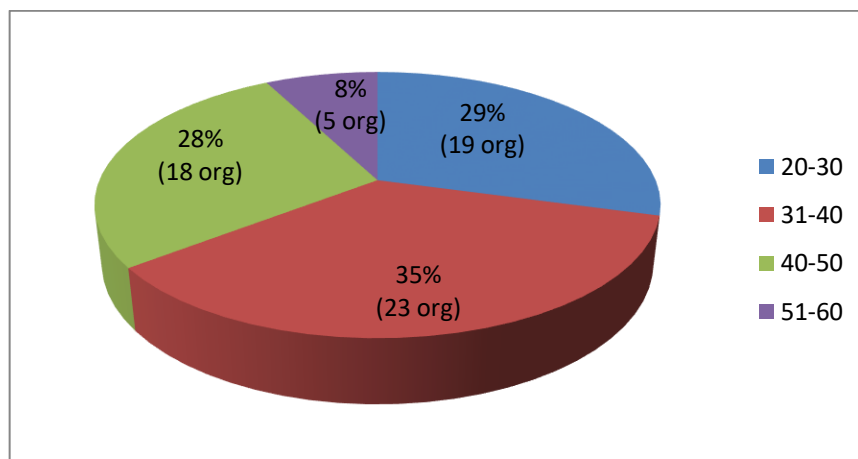
Berdasarkan diagram V.3 diatas dapat diketahui bahwa dari 65 orang jumlah responden dapat dilihat bahwa yang berpendidikan tertinggi

S2 ada 4 orang (6%), untuk pendidikan S1 ada 35 orang (54%), untuk DIII ada 12 orang (18%), untuk pendidikan SLTA ada 14 orang (22%).

d. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Perbedaan tingkat umur merupakan salah satu bahan pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan menentukan sikap kondisi layak dalam merespon sesuai kapasitas kebijakan usia yang matang sesuai umur responden yang bertingkat dari usia 20-60 tahun. Penulis dapat menggambarkan perbedaan tingkat umur yang menjadi responden penelitian. Untuk itu lebih jelasnya tentang perbedaan tingkat umur responden dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram V.4
Identitas Responden Berdasarkan Umur



Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

Berdasarkan diagram V.4 diatas dapat diketahui bahwa yang berusia 20-30 ada 19 orang (29%), untuk usia 31-40 ada 23 orang (35%), untuk usia 40-50 ada 18 orang (28%), untuk usia 51-60 ada 5 orang (8%).

2. Tanggapan Responden mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai

Penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada bab ini akan penulis sajikan data hasil temuan selama dilapangan yang nantinya akan dilakukan penganalisaan sebagai upaya dalam menjawab permasalahan yang penulis paparkan pada bab I.

Dalam penelitain ini, peneliti akan menganalisa data hasil penelitian dilapangan data yang diperoleh merupakan hasil angket yang disebarkan kepada reponden penelitian dan semua data yang diperoleh akan diolah sesuai dengan analisa data yang didasarkan pada indikator-indikator pengukuran. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 65 orang yang terdiri dari pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai serta Kader yang juga merupakan bagian dari implementor.

Sehubungan dengan judul penelitian ini yakni Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai), maka penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, yang meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Sturuktur Birokrasi. Berikut pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Komunikasi

Komunikasi Merupakan proses penyampaian informasi dari pelaksana Program Keluarga Berencana baik itu dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan, ketepatan informasi, serta kejelasan informasi yang diterima oleh Kader dan akseptor atau peserta KB.

Untuk melihat indikator *Komunikasi* penulis menggunakan empat sub indikator penelitian, dimana sub indikator tersebut yaitu:

- a. Penyuluhan program Keluarga Berencana, yang merupakan bentuk sosialisasi oleh PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) yang merupakan pegawai dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai yang bertugas untuk menyampaikan informasi terkait dengan Program Keluarga Berencana kepada Kader dan masyarakat di setiap Kecamatan di Kota Dumai.
- b. Pembagian buku Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada kader. Pembagian buku tersebut merupakan salah satu media untuk menyampaikan informasi dalam Program Keluarga Berencana. Isi buku tersebut adalah keterangan atau pedoman bagi Kader agar mengetahui lebih jelas mengenai Program Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan.
- c. Kegiatan turun ke lapangan dengan metode *Door to Door* menemui sasaran untuk ber-KB (calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan). Kegiatan ini merupakan metode penyampaian informasi secara langsung dengan calon akseptor atau sasaran pengguna KB

agar dapat mudah dipahami dan dicermati. Pelaksanaan metode ini dilakukan oleh Kader setempat.

- d. Pelaksanaan penyebaran informasi jadwal pelayanan ber-KB gratis. Pelaksanaan ini dimaksudkan agar akseptor mendapatkan pelayanan KB secara gratis yang telah disediakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai. Pelayanan KB gratis tersebut dilaksanakan di puskesmas seluruh Kecamatan Kota Dumai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap *Komunikasi* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1
Tanggapan Responden Terhadap Komunikasi

No.	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		T	KT	TT	
1.	Penyuluhan program Keluarga Berencana	30 (46%)	35 (54%)	0	65 (100%)
2.	Pembagian buku Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada kader	27 (42%)	36 (55%)	2 (3%)	65 (100%)
3.	Kegiatan turun ke lapangan dengan metode <i>Door to Door</i> menemui sasaran untuk ber-KB (calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan)	13 (20%)	49 (75%)	3 (5%)	65 (100%)
4.	Pelaksanaan penyebaran informasi jadwal pelayanan ber-KB gratis	19 (29%)	43 (66%)	3 (5%)	65 (100%)
TOTAL		89	163	8	260
RATA-RATA		22 (34%)	41 (63%)	2 (3%)	65 (100 %)

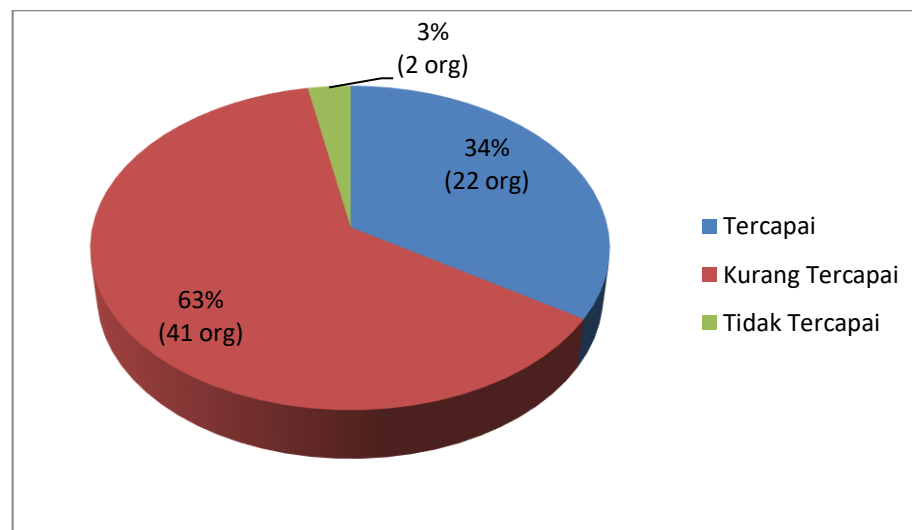
Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

Berdasarkan tabel V.1 diatas, dapat diketahui bahwa Komunikasi pada Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai, terdapat 89 tanggapan dengan rata-rata 22 responden (34%) yang menyatakan komunikasi dalam kategori Tercapai. Kemudian terdapat 163 tanggapan dengan rata-rata 41 responden (63%) yang menyatakan komunikasi dalam kategori Kurang Tercapai. Selanjutnya terdapat 8 tanggapan dengan rata-rata 2 responden (3%) yang menyatakan Komunikasi dalam kategori Tidak Tercapai.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi pada Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai berada pada kategori Kurang Tercapai dengan total 163 tanggapan atau dengan rata-rata 41 responden (63%).

Untuk lebih jelas mengenai hasil dari Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai dari indikator *Komunikasi*, penulis sajikan melalui diagram berikut ini.

Diagram V.5
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Komunikasi



Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa hasil dari tanggapan responden terhadap Komunikasi pada Implementasi Program KB di Kota Dumai, dinyatakan Kurang Tercapai dengan persentase 63% yang berdasarkan rata-rata jumlah responden sebanyak 41 orang.

2. Sumber Daya

Sumber daya dimaksudkan adalah tenaga kerja atau pegawai yang bertugas dalam proses implementasi kebijakan Program KB ini. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya peralatan, serta sumber daya informasi dan kewenangan.

Untuk melihat indikator *Sumber Daya* penulis menggunakan empat sub indikator penelitian, dimana sub indikator tersebut yaitu:

- a. PKB (penyuluh keluarga berencana dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang cukup/memadai. Dalam menjalankan program Keluarga Berencana, ketersediaan pelaksana harus tercukupi. Di setiap kecamatan di Kota Dumai, harus memiliki pelaksana dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai yaitu PKB dan PLKB.
- b. Kemampuan pegawai dalam memberikan penjelasan materi penyuluhan KB. Pegawai yang dimaksud adalah PKB yang memberikan penjelasan mengenai materi dalam setiap kegiatan sosialisasi atau penyuluhan KB. Maka demikian, PKB tersebut harus ahli dan mampu menjadi seorang mentor dihadapan Kader dan masyarakat.
- c. Keselarasan antara program KB dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai. Tujuan dari program KB harus selaras dengan yang dijalankan oleh seluruh pelaksana atau pegawai yang mana pelaksana

menjalankan tugasnya sesuai dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai.

- d. Sarana dan prasarana program Keluarga Berencana yang memadai merupakan faktor penting dalam melaksanakan program KB. Sarana dan prasarana tersebut adalah alat kontrasepsi, balai penyuluhan (kampung KB), dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap *Sumber Daya* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.2
Tanggapan Responden Terhadap Sumber Daya

No.	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		T	KT	TT	
1.	PKB (penyuluh keluarga berencana dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang cukup/memadai	17 (26%)	48 (74%)	0	65 (100%)
2.	Kemampuan pegawai dalam memberikan penjelasan materi penyuluhan KB	29 (45%)	36 (55%)	0	65 (100%)
3.	Keselarasn antara program KB dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai	58 (89%)	7 (11%)	0	65 (100%)
4.	Sarana dan prasarana program Keluarga Berencana yang memadai.	13 (20%)	44 (68%)	8 (12%)	65 (100%)
TOTAL		117	135	8	260
RATA-RATA		29 (45%)	34 (52%)	2 (3%)	65 (100 %)

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

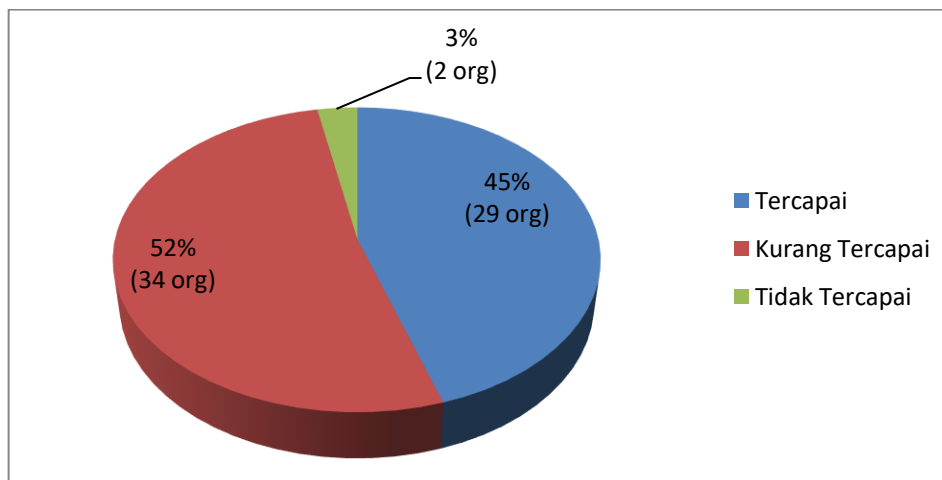
Berdasarkan tabel V.2 diatas, dapat diketahui bahwa Sumber Daya pada Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai, terdapat 117 tanggapan dengan rata-rata 29 responden (45%) yang menyatakan sumber daya dalam kategori Tercapai. Kemudian terdapat 135 tanggapan dengan rata-rata 34 responden (52%) yang menyatakan sumber daya dalam kategori Kurang Tercapai. Selanjutnya terdapat 8 tanggapan

dengan rata-rata 2 responden (3%) yang menyatakan sumber daya dalam kategori Tidak Tercapai.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sumber daya pada Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai berada pada kategori Kurang Tercapai dengan total 135 tanggapan atau dengan rata-rata 34 responden (52%).

Untuk lebih jelas mengenai hasil Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai dari indikator *Sumber Daya*, penulis sajikan melalui diagram berikut ini.

Diagram V.6
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Sumber Daya



Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa hasil dari tanggapan responden terhadap Sumber Daya pada Implementasi Program KB di Kota Dumai, dinyatakan Kurang Tercapai dengan persentase 52% yang berdasarkan rata-rata jumlah responden sebanyak 34 orang.

3. Disposisi

Disposisi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai instruksi atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh pelaksana program KB dalam menjalankan kebijakan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari pengukuran kinerja pelaksana Program KB berdasarkan kriteria kesuksesan dari implementasi kebijakan Program KB.

Untuk melihat indikator *Disposisi* penulis menggunakan empat sub indikator penelitian, dimana sub indikator tersebut yaitu:

- a. Pendelegasian tugas dan fungsi dari kepala dinas ke bidang program KB yang mana akan diteruskan pelaksanaannya sesuai dengan instruksi dan kebijakan yang berlaku
- b. Arahan pada pelaksanaan program KB gratis dari PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) kepada puskesmas sebagai mitra fasilitas kesehatan di setiap wilayah Kota Dumai. Dimana PKB merupakan perwakilan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai yang ditempatkan di setiap Kecamatan di Kota Dumai. PKB tersebut menjadi perwakilan untuk pengarahan Program KB gratis.
- c. Koordinasi mengenai program-program dalam bidang KB pada kader di setiap kecamatan ke masyarakat setempat. Maksudnya adalah PKB memberi arahan dan penjelasan mengenai Program KB yang akan dilaksanakan pada setiap Kecamatan di Kota Dumai.
- d. Target berupa Indikator Kinerja Pegawai (IKP) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota

Dumai dalam mencapai sasaran program keluarga berencana. Target tersebut dapat melihat bagaimana kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya pada program KB yang telah ditargetkan di wilayah Kota Dumai.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap *Disposisi* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3
Tanggapan Responden Terhadap Disposisi

No.	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		T	KT	TT	
1.	Pendelegasian tugas dan fungsi dari kepala dinas ke bidang program KB	43 (66%)	22 (34%)	0	65 (100%)
2.	Arahan pada pelaksanaan program KB gratis dari PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) kepada puskesmas sebagai mitra fasilitas kesehatan di setiap wilayah Kota Dumai	27 (42%)	38 (58%)	0	65 (100%)
3.	Koordinasi mengenai program-program dalam bidang KB pada kader di setiap kecamatan ke masyarakat setempat	25 (38%)	36 (55%)	4 (6%)	65 (100%)
4.	Target berupa Indikator Kinerja Pegawai (IKP) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai dalam mencapai sasaran program keluarga berencana.	48 (74%)	17 (26%)	0	65 (100%)
TOTAL		143	113	4	260
RATA-RATA		36 (55%)	28 (43%)	1 (2%)	65 (100 %)

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

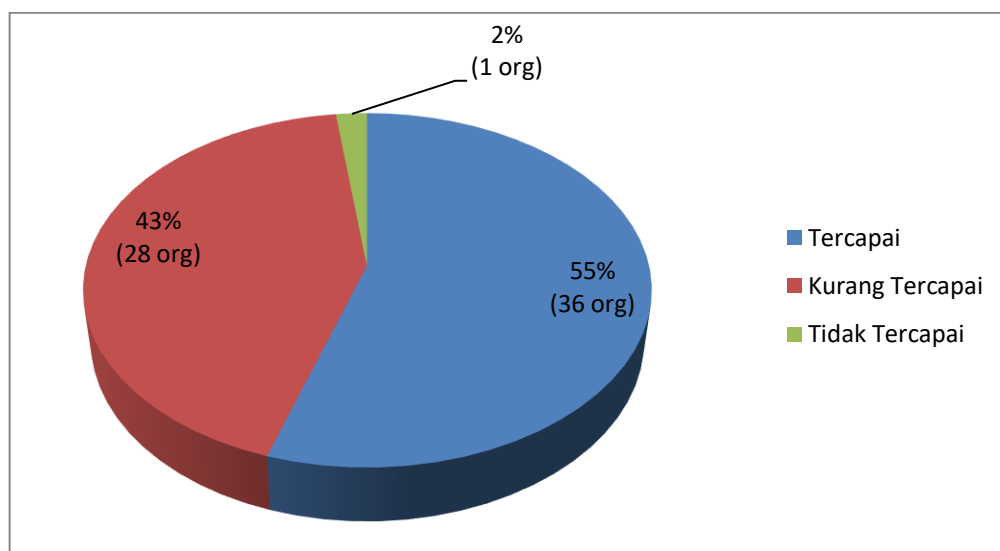
Berdasarkan tabel V.3 diatas, dapat diketahui bahwa Disposisi pada Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai, terdapat 143 tanggapan dengan rata-rata 36 responden (55%) yang menyatakan disposisi dalam kategori Tercapai. Kemudian terdapat 113 tanggapan

dengan rata-rata 28 responden (43%) yang menyatakan disposisi dalam kategori Kurang Tercapai. Selanjutnya terdapat 4 tanggapan dengan rata-rata 1 responden (2%) yang menyatakan disposisi dalam kategori Tidak Tercapai.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa disposisi pada Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai berada pada kategori Tercapai dengan total 143 tanggapan atau dengan rata-rata 36 responden (55%).

Untuk lebih jelas mengenai hasil Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai dari indikator *Disposisi*, penulis sajikan melalui diagram berikut ini.

Diagram V.7
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Disposisi



Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa hasil dari tanggapan responden terhadap Disposisi pada Implementasi Program KB

di Kota Dumai, dinyatakan Tercapai dengan persentase 55% yang berdasarkan rata-rata jumlah responden sebanyak 36 orang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi diartikan sebagai *standard operating procedures* (SOP) yang dijalankan bagi seluruh pegawai dalam Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan Program KB yang fungsinya mengefektifkan pengimplementasian kerja.

Selain itu, dalam struktur birokrasi yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai adalah upaya penyebaran pelaksanaan Program KB yang dilaksanakan di puskesmas dan balai penyuluhan berdasarkan setiap kecamatan yang ada di Kota Dumai.

Untuk melihat indikator *Struktur Birokrasi* penulis menggunakan empat sub indikator penelitian, dimana sub indikator tersebut yaitu:

- a. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai. Dalam hal ini adalah kebijakan tersebut menjadi pedoman bagi program KB yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan di Kota Dumai.

- b. SOP (*Standard Operating Procedure*) pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Sebagaimana yang dimaksud adalah bagaimana prosedur dari pelaksanaan program KB ini, apakah sesuai SOP atau tidak.
- c. Pembagian tugas yang jelas kepada PKB, PLKB, dan kader pada setiap kecamatan di Kota Dumai. Maksudnya adalah setiap pelaksana atau implementor memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.
- d. Keterlibatan mitra kerja (kader) pada pelaksanaan program KB di setiap wilayah di Kota Dumai. Dalam implementasi program KB, perlunya keterlibatan Kader di setiap wilayah kecamatan di Kota Dumai agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program KB.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap *Struktur*

Birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4
Tanggapan Responden Terhadap Struktur Birokrasi

No.	Sub Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		T	KT	TT	
1.	Kebijakan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai	48 (74%)	17 (26%)	0	65 (100%)
2.	SOP (<i>Standard Operating Procedure</i>) pelaksanaan Program Keluarga Berencana.	36 (55%)	28 (43%)	1 (2%)	65 (100%)
3.	Pembagian tugas yang jelas kepada PKB, PLKB, dan kader pada setiap kecamatan di Kota Dumai	33 (51%)	27 (41%)	5 (8%)	65 (100%)
4.	Keterlibatan mitra kerja (kader) pada pelaksanaan program KB di setiap wilayah di Kota Dumai	24 (37%)	27 (41%)	14 (22%)	65 (100%)
TOTAL		141	99	20	260
RATA-RATA		35 (54%)	25 (38%)	5 (8%)	65 (100 %)

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

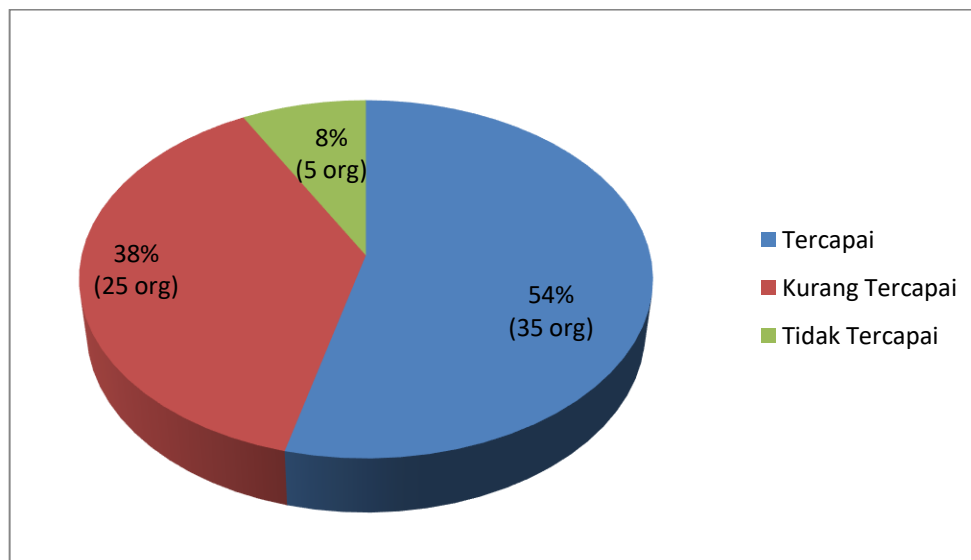
Berdasarkan tabel V.4 diatas, dapat diketahui bahwa Struktur Birokrasi pada Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai, terdapat 141 tanggapan dengan rata-rata 35 responden (54%) yang menyatakan struktur birokrasi dalam kategori Tercapai. Kemudian terdapat 99 tanggapan dengan rata-rata 25 responden (38%) yang menyatakan struktur birokrasi dalam kategori Kurang Tercapai.

Selanjutnya terdapat 20 tanggapan dengan rata-rata 5 responden (8%) yang menyatakan struktur birokrasi dalam kategori Tidak Tercapai.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi pada Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai berada pada kategori Tercapai dengan total 141 tanggapan atau dengan rata-rata 35 responden (54%).

Untuk lebih jelas mengenai hasil Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai dari indikator *Struktur Birokrasi*, penulis sajikan melalui diagram berikut ini.

Diagram V.8
Hasil Tanggapan Responden Terhadap Struktur Birokrasi



Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa hasil dari tanggapan responden terhadap Struktur Birokrasi pada Implementasi Program KB di Kota Dumai, dinyatakan Tercapai dengan persentase 54% yang berdasarkan rata-rata jumlah responden sebanyak 35 orang.

Untuk melihat lebih jelas keseluruhan hasil tanggapan responden mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai), dapat dilihat dari empat indikator dengan 65 responden pada tabel rekapitulasi berikut ini :

Tabel V.5
Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Implementasi Program
Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai)

No.	Indikator	Kriteria Jawaban			Jumlah
		T	KT	TT	
1.	Komunikasi	22 (34%)	41 (63%)	2 (3%)	65 (100%)
2.	Sumber Daya	29 (45%)	34 (52%)	2 (3%)	65 (100%)
3.	Disposisi	36 (55%)	28 (43%)	1 (1%)	65 (100%)
4.	Struktur Birokrasi	35 (54%)	25 (38%)	5 (8%)	65 (100%)
TOTAL		122	128	10	260
RATA-RATA		30 (47%)	32 (49%)	3 (4%)	65 (100 %)

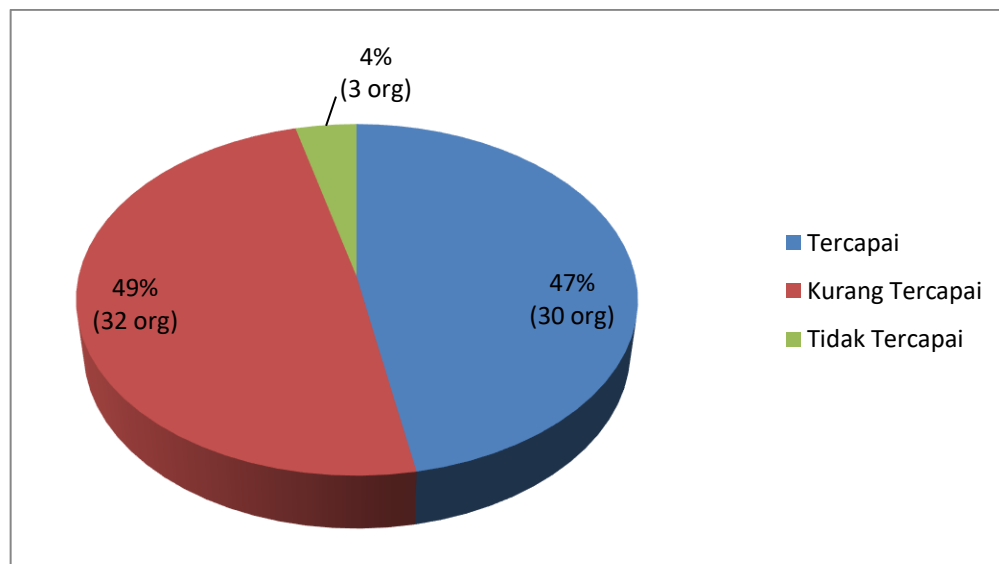
Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2023

Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai) berada di kriteria Kurang Tercapai dengan persentase 49% dengan rata-rata responden sebanyak 32 orang.

Untuk lebih jelas mengenai hasil tanggapan responden dari Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai), dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

Diagram V.9

Hasil Tanggapan Responden Terhadap Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai)



Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa hasil dari tanggapan responden terhadap Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai), dinyatakan Kurang Tercapai dengan persentase 49% yang berdasarkan rata-rata jumlah responden sebanyak 32 orang.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Keluarga Berencana (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai)

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai), dalam pelaksanaannya memiliki faktor pendukung dan penghambat yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai), yaitu :

- a) Adanya Disposisi berupa instruksi atau tindakan dalam Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai). Hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Adanya pendelegasian tugas yang sesuai dengan kebutuhan dalam program Keluarga Berencana seperti arahan pada setiap PKB, PLKB, dan Kader dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana. Dengan begitu, dapat terlaksanakannya kebijakan secara efektif dan efisien karena adanya PKB sebagai pemimpin yang mengkoordinir kegiatan penyuluhan, PLKB sebagai petugas lapangan, dan Kader yang membantu

pelaksanaan penyuluhan karena kader sendiri adalah mitra yang berasal dari masyarakat juga.

2) Adanya target berupa Indikator Kinerja Pegawai (IKP) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai dalam mencapai sasaran program keluarga berencana. Target tersebut dapat melihat bagaimana kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya pada program KB yang telah ditargetkan di wilayah Kota Dumai. Target tersebut juga merupakan data yang akurat untuk mengetahui berapa jumlah akseptor yang akan menggunakan program KB.

b) Adanya Struktur Birokrasi sebagai pedoman dalam proses pelaksanaan Program KB yang fungsinya mengefektifkan pengimplementasian kerja. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang diterapkan sesuai dengan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai. Kebijakan itu sendiri tentunya akan berdampak baik pada masyarakat seperti adanya layanan KB gratis setiap 3 bulan sekali yang diadakan di puskesmas seluruh wilayah kecamatan Kota Dumai. Hal ini tentu berdampak baik bagi masyarakat dengan ekonomi rendah yang ingin menjadi akseptor atau pengguna KB.

2. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat pada Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai), yaitu :

a) Kurangnya komunikasi dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai). Hal itu dapat dilihat dari :

- 1) Kurangnya penyuluhan program Keluarga Berencana yang merupakan bentuk sosialisasi oleh PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) untuk menyampaikan informasi terkait dengan Program Keluarga Berencana kepada Kader dan masyarakat di setiap Kecamatan di Kota Dumai. Namun, banyak masyarakat yang tidak tau adanya kegiatan penyuluhan dikarenakan kurangnya informasi mengenai jadwal penyuluhan di balai penyuluhan atau kampung KB di wilayah mereka.
- 2) Kurangnya kegiatan turun ke lapangan dengan metode *Door to Door* menemui sasaran untuk ber-KB (calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan). Kegiatan ini merupakan metode penyampaian informasi secara langsung dengan calon akseptor atau sasaran pengguna KB agar dapat mudah dipahami dan dicermati. Pelaksanaan metode ini dilakukan

oleh Kader setempat. Namun, dalam beberapa pernyataan oleh masyarakat serta pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai mengatakan bahwa kegiatan metode *Door to Door* ini sudah jarang dilakukan oleh beberapa Kader setempat.

3) Kurangnya peredaran informasi mengenai layanan KB gratis.

Hal ini dikarenakan informasi layanan KB gratis yang hanya dibagikan ke puskesmas setempat yang mana tidak semua masyarakat datang ke puskesmas jika tidak ada kepentingan. Hal tersebut menjadi penyebab target yang telah ditetapkan dalam program Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Dumai tidak tercapai di beberapa daerah.

b) Kurangnya sumber daya dalam Implementasi Program Keluarga Berencana di Kota Dumai (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai). Hal itu dapat dilihat dari :

- 1) Kurangnya PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) hanya tersedia 1 orang dan PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) tersedia maksimal 3 di setiap kecamatan.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan program KB. Para implementor mengaku kekurangan sarana dan prasarana seperti proyektor, pengeras

suara dan alat pendukung lainnya ketika melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi.